



Nana Sudjana (kanan) mendampingi Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Nana Sudjana Tegaskan Stakeholder Solid Kawal Pilkada Serentak

SEMARANG (KR) - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan, para stakeholder di Jawa Tengah solid dan siap mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, yang akan berlangsung November mendatang. Nana Sudjana mengatakan hal ini usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Wilayah Jawa, di Yogyakarta Rabu (21/8). Pemprov Jawa Tengah sudah membangun konsolidasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), TNI, Polri, partai politik, maupun tokoh masyarakat.

"Koordinasi sudah kita lakukan, saya rasa kita sudah cukup solid. Termasuk sudah melakukan rapat koordinasi, pelatihan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), juga sudah memetakan berbagai permasalahan yang ada di Jawa Tengah," tutur Nana Sudjana.

Beberapa Rakor yang telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah di antaranya Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada serentak 2024, Rakor Desk Pilkada dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jateng. Polda Jawa Tengah juga sudah menyelenggarakan Rakor Kesiapan Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024.

Selain itu, pengalokasian anggaran Pilkada baik dari Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota juga sudah terpenuhi. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah mulai dicairkan kepada penyelenggara pemilu dan TNI/Polri. "NPHD-nya sudah diberikan, namun masih ada beberapa kabupaten yang belum tuntas. Ada yang tahap pertama sudah selesai, ada yang tahap kedua sudah selesai. Tetapi nanti akan kita koordinir untuk segera diselesaikan," katanya.

Menurut Nana Sudjana dinamika setiap tahapan pilkada tetap berpotensi ada. Untuk itu Pemprov Jawa Tengah bersama stakeholder akan selalu mengikuti segala perkembangan yang terjadi, dan terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, dan Forkopimda. (Bdi)-f

Puluhan Warga Ngemplak Datangi PN Boyolali

BOYOLALI (KR) - Puluhan warga Ngemplak, Boyolali datang kantor Pengadilan Negeri (PN) setempat. Kedatangan mereka merupakan aksi solidaritas kepedulian sesama warga Perguruan silat yang terjerat kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Aan Hengky Damai Setianto.

Kasus penganiayaan, hari Rabu (21/8) mulai disidangkan. Sebelum sidang digelar, majelis hakim PN Boyolali terlebih dulu melaksanakan Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi ditempuh mengingat RM dan LAR itu usianya masih dibawah 17 tahun. Ancaman hukuman bagi dua terdakwa anak ini juga dibawah 7 tahun penjara. Hakim pun kemudian memfasilitasi dua belah pihak, yakni korban dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hanya saja, langkah Diversi ini gagal ditempuh. Keluarga korban tetap kukuh menginginkan dua anak yang juga terlibat melakukan penganiayaan itu diadili. "Tadi sudah ditawarkan (upaya Diversi). Temyata (keluarga korban) tidak bersedia. Jadi ketika tidak bersedia berarti mulai persidangan," kata Juru Bicara PN Boyolali, Lis Susilowati, Rabu (21/8).

Karena tak terjadi kesepakatan, lanjut dia, sidang kasus tersebut dilanjutkan. Sidang digelar secara tertutup. Agenda sidang perdana ini dimulai dari Hakim memeriksa identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Dikatakan lebih lanjut, mendengar surat dakwaan itu, Kuasa hukum pelaku anak menyatakan keberatan. "Untuk sidang hari ini ditunda karena akan ada pengajuan keberatan dari pihak pelaku anak," kata Lis.

Sementara itu, keluarga korban menginginkan sidang anak ini tetap dilanjutkan. "Dari kami pihak keluarga korban menolak keras adanya diversifikasi," kata penasehat hukum keluarga korban, Hari Pamularsih. Pihak keluarga menolak diajak damai dengan menyelesaikan perkara ini diluar persidangan. Karena memang, keluarga kehilangan anak. "Wong kelangan anak kok, semudah itu mau damai," katanya. (Mul)-f

Desa Antikorupsi untuk Tata Kelola Pemdes

TEMANGGUNG (KR) - Kabupaten Temanggung kini memiliki 8 desa antikorupsi. Pada 2024 ada penambahan 7 desa antikorupsi. Mereka adalah Desa Plosogaden, Ketintang, Pandemulyo, Kedungumpul, Ringinanom, Salamrejo, Ngandong dan Tanurejo. Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo mengatakan desa antikorupsi untuk terwujudnya nilai-nilai integritas dan menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik dan transparan. "Kami gencarkan sosialisasi desa antikorupsi. Temanggung, kini memiliki 8 desa antikorupsi," katanya.

Hary Agung mengatakan melalui sosialisasi berharap seluruh lapisan masyarakat di desa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah tindakan korupsi. "Saya mengajak semua pihak mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga seluruh warga untuk turut serta dalam pencegahan korupsi," katanya.

Hary Agung mengajak masyarakat membangun budaya transparansi, budaya akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi dalam pemerintahan desa dengan komitmen dan kerja sama yang baik. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan mewujudkan desa yang lebih adil dan sejahtera. "Saya mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam mewujudkan desa antikorupsi agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, akuntabel, transparan, yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme," katanya. (Osy)-f

Bea Cukai Jateng-DIY Musnahkan Pakaian Bekas dan Kosmetik

SEMARANG (KR) - Kanwil Direktur Jenderal Bea Cukai Jateng-DIY memusnahkan berbagai barang sitaan hasil penindakan penertiban importasi. Diantaranya pakaian bekas, alat elektronik dan alat alat kecantikan. Pemusnahan barang berjalan dari luar negeri senilai tidak kurang Rp 18,6 miliar dengan cara dibakar berlangsung, Rabu (21/8) di tempat penimbunan pabean, KPPBC TMP Tanjung Emas, Semarang.

Kakanwil DJBC Jateng-DIY Ahmad Rofiq mengatakan berbagai barang yang dimusnahkan itu hasil penertiban importasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Penertiban importasi ini berupa penindakan dan penengahan barang larangan dan pembatasan yang masuk melalui wilayah KPPBC TMP Tanjung Emas, khususnya terhadap 7 komoditas yang diatur importasinya dan menjadi atensi Satgas Impor.

Disebutkan secara total ada 542 kasus penindakan dilakukan periode tahun ini. Yakni sejak 1 Januari hingga 14 Agustus 2024,

oleh Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pelabuhan Tanjung Emas Kanwil Jateng & DI Yogyakarta.

Ahmad Rofiq menyebutkan barang-barang tersebut terdiri ada tujuh khususnya komoditas dan non komoditas, yang statusnya masih barang dikuasi negara (BDN) senilai 1,3 miliar. Status su-

dah menjadi barang menjadi milik negara (BMMN) senilai Rp 532,7 juta. Kemudian, status barang telah direskpose Rp 12,8 milyar, status barang telah dilelang Rp 1,4 miliar, barang impor telah siap untuk dimusnahkan Rp 18,6 miliar.

Sedangkan tujuh komoditas dan non komoditas ini didalamnya terdapat ada barang tekstil, kos-

metik, aksesoris, pakaian bekas, barang besi atau baja, mesin, peralatan kesehatan, termasuk makanan. Selain itu, juga terdapat barang pencegahan berupa atas ballpress 12 kontainer 20" sebanyak 1.196 bale pakaian bekas berbagai merek dengan perkiraan nilai ekonomi senilai Rp 5,9 miliar. Posisi barang tersebut sampai saat ini masih di TPKS yang statusnya sebagai barang dikuasi negara.

"Kita lihat juga barang barang disini hasil penindakan, ada yang masih berproses, dan kemudian ada juga yang tadi dimusnahkan. Ada elektronik, tekstil, ada tujuh produk komoditas dan non komoditas", jelas Kanwil Bea dan Cukai Jateng-DIY, Akhmad Rofiq. Ia mengatakan penertiban barang importasi dengan harapan industri di dalam negeri berkembang ini telah diterbitkan pada 11 Desember 2023, terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2024. (Cry)-f



Barang hasil sitaan Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY dimusnahkan dengan cara dibakar.

BANTU WILAYAH TERDAMPAK KEKERINGAN DI WONOGIRI LPS Salurkan Ratusan Tangki dan Pompa Air Bersih

WONOGIRI (KR) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan bantuan 180 tangki air bersih yang akan disalurkan untuk 8 wilayah di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang mengalami siaga darurat bencana kekeringan. LPS juga memberikan bantuan pemasangan pompa air bersih beserta jaringan perpipaan di 3 wilayah, yakni di Kecamatan Girimoyo, Giritontro dan Kecamatan Eromoko.

"Kami berencana pula memberikan bantuan kajian potensi sungai bawah tanah di Wonogiri Selatan. Besar harapan kami, bantuan ini dapat digunakan untuk membantu mengatasi kekeringan yang melanda Kabupaten Wonogiri serta bermanfaat untuk masyarakat," ujar Anggota Dewan Komisiner LPS Didik Madiyono di Wonogiri, Rabu (21/8).

Saat ini Wonogiri menjadi salah satu daerah terdampak kekeringan aki-

bat musim kemarau yang melanda Indonesia selama beberapa bulan bel-

kangan. Pemkab Wonogiri pun telah menetapkan status siaga darurat ben-



Bantuan tangki dan pompa air bersih dari LPS untuk masyarakat Wonogiri yang terdampak kekeringan.

cana kekeringan pada 4 kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada musim kemarau tahun 2024.

"Apresiasi dan terima kasih kami untuk LPS, bantuan ini akan bermanfaat sekali bagi masyarakat. Utamanya bagi para petani yang akhir-akhir ini sangat terdampak kekeringan. Bantuan LPS ini bukan yang pertama, sebelumnya LPS juga telah membantu dan dampaknya sangat terasa sekali bagi masyarakat," ucap Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno.

Sebelumnya, pada 2023 lalu LPS telah memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan di Wonogiri berupa mesin pompa air sumur bor sumur dalam lengkap

dengan pipa-pipa, toren air berkapasitas 5.000 liter 2 unit, bantuan air bersih untuk 6 desa total 241 tangki air dengan kapasitas 6.000 liter per tangki, dan pipanisasi yang disalurkan dalam 2 gelombang bantuan.

Pelaksanaan program kali ini sebagai bentuk kerja sama LPS, Pemka Wonogiri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri serta Yayasan Sharing Happiness. Dalam rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan di Wonogiri, LPS juga memberikan santunan pendidikan untuk anak yatim dan/atau piatu serta tidak mampu di Komunitas Pengajian Al-Hidayah Masjid At-Taqwa Wonogiri. (San)-f

KPU Sukoharjo Tunggu Masukan Masyarakat

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melakukan penempelan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024 di papan pengumuman di balai desa, kantor kelurahan dan RT/RW. Setelah ditempelkan nantinya KPU Sukoharjo menunggu tanggapan dan masukan masyarakat.

Komisiner KPU Sukoharjo Divisi Perencanaan Data dan Informasi Arief Wicaksono, Kamis (22/8) mengatakan, KPU Sukoharjo melakukan penempelan DPS di balai desa dan papan pengumuman di tingkat RT dan RW di seluruh wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Penempelan tersebut dilakukan setelah KPU Sukoharjo sebelumnya menyelesaikan penyusunan DPS. Disisi lain penempelan juga dilakukan agar masyarakat mengetahui tahapan dan memastikan nama mereka sudah masuk dalam DPS atau belum.

KPU Sukoharjo selain melakukan penempelan juga mengecek daftar pemilih secara online. Kegiatan digelar mulai 20 Agustus sampai 23 September 2024. Petugas untuk lebih memastikan nama pemilih masuk DPS menggelar kegiatan door to door ke rumah pemilih. Kegiatan dilakukan KPU Sukoharjo dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Sukoharjo.

"Kami menempelan DPS ini agar diketahui masyarakat serta masya-

rakat juga punya peran aktif untuk memberi masukan secara aktif kepada kami. Selain mengetahui masyarakat juga bisa memberi masukan secara mandiri melalui cekdptonline.kpu.go.id atau melalui pps dengan mengisi formulir a tanggapan, menyertakan bukti dokumen yang sah seperti KTP dan KK kemudian menunggu verifikasi yang akan dikirim melalui sms atau WhatsApp atau surat dari KPU Sukoharjo," ujarnya.

Selain itu KPU juga akan berencana melakukan uji publik pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan memfokuskan pada pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar. Perbaikan data pemilih, pemilih yang tidak berdomisili sesuai data kependudukan, pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali dan pemilih yang terdaftar namun sudah tidak memenuhi syarat menjadi pemilih.

Uji publik ini nanti akan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, Panwas desa dan mantan pantarlil. "Diharapkan dengan uji publik ini kita dapat menghasilkan data pemilih yang akurat," lanjutnya. Jumlah pemilih Pilkada 2024 tertinggi di Kecamatan Grogol sebanyak 91.041 orang. Sedangkan terendah di Kecamatan Bulu 28.794 orang. Sedangkan secara keseluruhan pemilih Kabupaten Sukoharjo 685.670 orang. Angka tersebut merupakan DPS sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo. Ketua KPU Kabupaten

Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, mengatakan, berdasarkan DPS Pilkada 2024 yang sudah selesai ditetapkan dalam rapat pleno diketahui jumlah desa dan kelurahan 167, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 1.305, jumlah pemilih laki-laki 338.543 orang, jumlah pemilih perempuan 347.127

orang, jumlah total pemilih laki-laki dan perempuan 685.670 orang.

Berdasarkan rincian diketahui jumlah pemilih Pilkada 2024 tertinggi diketahui Kecamatan Grogol 91.041 orang, Kecamatan Kartasura 82.717 orang, Kecamatan Sukoharjo 74.538 orang, Kecamatan Mojolaban 69.377 orang,

Kecamatan Polokarto 65.796 orang, Kecamatan Baki 54.063 orang, Kecamatan Bendosari 48.639 orang, Kecamatan Weru 44.465 orang, Kecamatan Tawangarsari 43.339 orang, Kecamatan Nguter 42.170 orang, Kecamatan Gatak 40.731 orang dan Kecamatan Bulu 28.794 orang. (Mam)-f

Mimbar Legislatif

Tata Kelola BUMD dan BMD Jadi Sorotan Komisi C

UNTUK merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Komisi C DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, di Jakarta Rabu (21/8).

Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto kepada wartawan di Semarang Kamis (22/8), usai melakukan Kunker ke Kemendagri. Komisi C sangat apresiatif terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh jajaran Kemendagri. Dari hasil konsultasi tersebut, di harapkan Raperda yang sedang disusun dapat segera dirampungkan.

Komisi C DPRD Jateng berharap dengan rampungnya Raperda tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD dan Raperda tentang BMD dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) nanti, dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan BUMD dan BMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Bambang Ardianto selaku Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD, Kemendagri memberi masukan untuk Raperda tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD itu sifatnya teknis dan masuk dalam peraturan direksi di tiap perusahaan. Hal itu mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Soal tata kelola, aturannya terkait dengan interaksi SDM di masing-masing BUMD, dan pengelolaan perusahaan dengan mitranya. Masing-masing BUMD membuat SOP sesuai perdananya. Soal laba perusahaan atau kinerja keuangan, tidak sesuai jika diatur dalam Perda, karena bisa membatasi ruang gerak BUMD dalam pengelolaan bisnisnya. Menurut Kemendagri, persoalan pembinaan dan pengawasan yang harus masuk dalam draft Raperda. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam Raperda berada di seputar pendirian dan penyertaan modal BUMD. □-f

(Disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto kepada wartawan KR Biro Semarang Budiono Isman-Anf)